Anggaran Pilkada Dimasukkan di APBD-P

Ambil Sikap Setelah Mendagri Menyurat Gubernur

Editor : Irman Saleh Peliput: Mahfud Hi Husen

TIDORE - Polemik anggaran pemilihan kepala daerah di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) baik KPU maupun Bawaslu masih berlangsung. Pasalnya, hingga saat pemangkasan anggaran yang dilakukan DPRD dan Pemkot pasca penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pasalnya, NPHD yang ditandatangani anggaran Pilkada untuk KPU sebesar Rp 17,5 miliar dan Bawaslu Rp 7 miliar. Namun yang diakomodir dalam APBD untuk KPU hanya Rp 12 miliar, sementara Bawaslu hanya Rp 3,5 miliar.

KPU Tikep dan Bawaslu Tikep pun telah menyampaikan pemangkasan anggaran ini ke KPU dan Bawaslu RI, serta Kemendagri. Bahkan Kemendagri saat ini telah menyurati Gubernur Abdul Gani Kasuba untuk mengevaluasi kembali APBD. Menanggapi hal itu, Wali Kota Capt. Ali Ibrahim mengatakan pihaknya tetap akan mengakomodir anggaran Pilkada ini pada APBD Perubahan. "Nanti kita kasih masuk di APBD Perubahan. Kita tetap akomodir," katanya singkat saat ditemui belum lama ini. Wali Kota juga menyampaikan hal ini telah dikoordinasikan sebelumnya dengan KPU maupun Bawaslu untuk diakomodir di APBD.

Sebelumnya Ketua KPU Tikep mengatakan pihaknya tetap berpedoman pada NPHD yang sudah disetujui bersama Pemkot yakni Rp 17,5 miliar, itu pun anggaran kenaikan honorarium *ad hoc* belum termasuk di dalamnya. KPU Tikep juga telah menyurati secara resmi ke Pemkot terkait penyesuaian kenaikan honorarium ad hoc.

Sementara Ketua Bawaslu Tikep mengatakan jika Pemkot mengakomodir di APBD Perubahan, pihaknya tetap menolak hal itu. Ini karena APBD Perubahan itu disahkan pada Juni, sementara tahapan Pilkada sudah mau selesai. Belum lagi gaji *ad hoc* yang apabila ditotalkan semuanya 4 Miliar lebih. "Kalau nanti di APBD Perubahan, tahapan sudah selesai. Padahal setiap tahapan berjalan, anggaran itu untuk membiayai tahapan-tahapan itu.

Tidak mungkin kami pinjam uang sebanyak itu diluar. Kami sudah sepakat, jika Pemkot tetap pada pendiriannya, maka kami akan jalankan pengawasan sesuai anggaran yang ada," tandasnya. (cr-03/lex)

SEMENTARA ITU

Festival Tomalou Bakal Dibuka Menteri KP

TIDORE - Festival Kampung Nelayan Tomalaou yang semulanya dilaksanakan pada 19 sampai 26 Januari, ditunda, lantaran menyesuaikan dengan waktu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP). Kegiatan ini akan dilaksanakan kembali pada 15 sampai 23 Februari 2020, dan bakal dibuka langsung Menteri KP, Edi Prabowo. Hal ini disampaikan Ketua Pemuda Tomalou, Abdullah Dahlan, kemarin (11/1).

Menurut Abdullah, pihak panitia telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian KP untuk memastikan kehadiran Menteri Edi Prabowo. Menteri juga telah bersedia untuk hadir dan membuka festival yang mengusung tema "menjaring kekuatan di atas sampan" ini. "Pak Menteri sudah menyatakan kesediannya untuk hadir, semoga tidak ada hambatan," tuturnya.

Abdullah bilang, kegiatan festival ini menampilkan sejumlah kegiatan yakni seminar atau workshop, cerdas cermat nelayan, pameran, lomba mancing, lomba renang, lomba dayung, dan permainan anak nelayan. Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menggali peradaban kampung Tomalou yang dulunya pernah berjaya menjadi kampung nelayan, atau dengan kata lain sebagai napak tilas sejarah kampung nelayan. "Festival ini memiliki nilai edukasi yang diharapkan dapat dicerna generasi muda agar memahami dan mengenal sejarah peradaban Kampung Tomalou," terangnya, sembari mengatakan saat ini persiapan panitia menghadapi festival sudah mencapai 95 persen.(cr-03/lex)



KUNJUNGAN: Wali Kota Tikep (kedua kiri) berpose dengan utusan BPS usai membahas sensus.

WATERBOOM FIF GROUP **TELKOMSEL** MALUT POST **TUKAR 20** DAPATKAN Spesial untuk member Spesial untuk member FIF GROUP Malutpost *NATERBOOM* **New Concept** Mandi Busa* Seluncuran RESTOBAR Ember Tumpah* Kolam Arus Company Gathering *Merchandise *Paket Ulang Tahun JAM OPERASIONAL Cooking Class **SELASA - JUM'AT** *Ruang Meeting Home Band & DJ **SABTU - MINGGU** @waterboom.ternate

Minta Dukungan Terkait Sensus Penduduk

TIDORE - Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan, Ir. Salahuddin, untuk meminta dukungan terkait dengan Sensus Penduduk, bertempat di Ruang Kerja Wali Kota

Dalam pertemuan itu, Salahuddin, menyampaikan sensus penduduk yang akan dilaksanakan ini merupakan hajatan besar BPS, karena sensus serentak dilaksanakan tiap sepuluh tahun sekali di seluruh Republik In-

Salahuddin juga mengatakan bahwa kedatangan mereka bukan hanya meminta dukungan saja, namun meminta Pemerintah Daerah untuk ikut terlibat mensukseskan hajatan tersebut dengan ikut mensosialisasikan sensus penduduk. Terkait dengan cara-cara yang digunakan, Salahuddin merinci bahwa kegiatan akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama meng-

gunakan sensus sistem online yang direncanakan dalam rentang waktu 15 Februari sampai dengan 15 Maret 2020. Sistem ini dapat digunakan oleh secara mandiri oleh masyarakat dengan cara mengakses melalui situs sensus.bps.go.id sehingga masyarakat bisa memasukkan data-data mereka sendiri secara online berdasarkan dengan data yang sebenarnya.

Pada tahap kedua Badan Pusat Statistik juga akan turun langsung untuk wawancara dengan sistem doortodoor. Namun Salahuddin menegaskan agar data online bisa merangkum data penduduk se Kota Tidore Kepulauan sebanyak-banyaknya. "Saya harap agar sensus penduduk menggunakan sistem online ini bisa mendata penduduk di Kota Tidore Kepulauan dengan persentase besar mengingat saat ini hampir tiap penduduk sudah bisa mengakses internet dengan baik, saya juga mengharapkan agar Aparatur Sipil Negara di Kota Tidore Kepulauan

bisa berperan dengan aktif dalam pendataan berbasis online ini," katanya.

Menutup pertemuan tersebut Wali Kota menginstruksikan langsung kepada dinas terkait agar mampu membantu BPS dalam pendataan sensus penduduk, serta Āli juga berharap agar publikasi hajatan sensus ini bisa menyentuh masyarakat di tingkat kelurahan dan desa sehingga Ali secara khusus mengimbau para Lurah dan Kepala Desa agar bisa kooperatif dalam membantu sensus penduduk tahun 2020 untuk mewujudkan satu data Indonesia. (humas)



"Saya harap agar sensus penduduk menggunakan sistem online ini bisa mendata penduduk di Kota Tidore Kepulauan dengan persentase besar mengingat saat ini hampir tiap penduduk sudah bisa mengakses internet dengan baik, saya juga mengharapkan agar Aparatur Sipil Negara di Kota Tidore

Kepulauan bisa berperan dengan aktif dalam

pendataan berbasis online ini,"

Ir. Salahuddin Kepala BPS

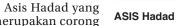
Asis: Pemkot Tidak Tertutup

Tidore Kepulauan H. Asrul Sani So-secara umum dan jajarannya tidak leiman menegaskan bahwa saat ini pernah menutup diri dari wartawan.

TIDORE - Sekretaris Daerah Kota Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Hal ini terungkap dari Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Asis Hadad pada saat mengkonfirmasi berita yang dimuat di Harian Malut Post pada halaman 3 tertanggal 10 Januari 2020, di Ruang Kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jumat(10/1).



merupakan corong Pemda Kota Tidore Kepulauan menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung pada saat itu, bahwa seperti termuat pada Harian Malut Post tersebut setelah dikonfirmasi kepada pejabat yang dimaksud yakni Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan merunut kejadian bahwa memang pada saat menjelang salat Ashar dan saat itu Sekkot sedang mempersiapkan diri untuk salat dan saat itu Sekkot sudah sementara mengambil

air wudhu. "Tidak benar Sekkot menutupi hasil sidang ASN, yang ada beliau pada saat kejadian mau diwawancara wartawan hanya saja beliau (Sekkot) belum bisa menerima tamu pada saat itu, berhubung sedang bersiap untuk salat Ashar dan sedang dalam keadaan sementara mengambil air wudhu, namun setelah salat Ashar, Sekkot menyempatkan meminta kepada ajudannya untuk memanggil wartawan yang hendak wawancara namun wartawan tersebut sudah terlanjur meninggalkan kantor Wali Kota," kata Asis Hadad. (humas)

